



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Tahun 2024 Oleh Komisi Informasi Daerah DIY

Kalurahan Kini Turut Jadi Sasaran Penilaian

Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai melibatkan kalurahan sebagai badan publik yang dievaluasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2024.

Ketua KID DIY, Erniati mengatakan, sebanyak 20 persen kalurahan dari setiap kabupaten di DIY menjadi peserta monev. Dengan begitu, ada 79 kalurahan yang ikut monev tahun ini. Kalurahan Srimulyo menjadi satu-satunya kalurahan yang mendapatkan nilai

95 dengan kualifikasi Informatif. Sementara, Kalurahan Sumberwungu, Girimulyo, Ngestirejo, Giripanggung mendapatkan nilai 81-89 dan masuk kualifikasi Menuju Informatif.

"Target kami, pada tahun 2027, seluruh kalurahan di DIY dapat ikut serta dalam monev dan meraih predikat Badan Publik Informatif," ujarnya

● ke halaman 11



APRESIASI
Tribun Jogja turut menerima anugerah apresiasi sebagai media mitra keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY.

ISTIMEWA

Kalurahan Kini Turut

● Sambungan Hal 1

dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY 2024 di Grand Rohan Hotel Yogyakarta, Selasa (10/12).

Penganugerahan kali ini memiliki tema 'Layanan Informasi Makin Berkualitas, Badan Publik Naik Kelas'. Erniati menjelaskan bahwa kegiatan monev tahun ini melibatkan unsur pentaheliks, yakni akademisi, lembaga masyarakat, mahasiswa, pemerintah daerah, dan media massa. Pelaksanaan monev diketuai oleh Darmanto, S.Pd., MPA, dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ia menyebutkan bahwa badan publik peserta monev dapat mengakses hasil evaluasinya melalui *dashboard* e-Monev yang telah disediakan oleh KID DIY. "Fasilitas ini memungkinkan badan publik melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan tata ke-

lola keterbukaan informasi," ujarnya.

Dalam laporannya, Erniati mengatakan, KID DIY mengungkap beberapa temuan penting. Dia menjelaskan, sebagian badan publik telah mencantumkan keterbukaan informasi dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), tetapi masih sebatas latar belakang tanpa dijadikan rencana kerja konkret. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi cenderung untuk kebutuhan internal, bukan untuk layanan informasi publik.

"Sumber daya manusia (SDM) yang mengelola informasi publik dinilai cukup memadai secara kuantitas, tetapi masih membutuhkan peningkatan kapasitas berkelanjutan. Di sisi lain, rata-rata nilai keterbukaan informasi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih rendah," jelasnya.

Menanggapi temuan tersebut, KID DIY memberikan beberapa rekomendasi, antara lain pimpinan daerah diminta

memastikan aspek keterbukaan informasi publik tercantum secara eksplisit dalam dokumen Renstra, Rencana Kerja, dan Anggaran. "Perlu penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk tata kelola keterbukaan informasi publik. Juga, optimalisasi peran PPID Utama di setiap tingkat pemerintahan untuk pendampingan dan peningkatan kapasitas badan publik," katanya. Erniati juga menekankan pada peningkatan perhatian terhadap keterbukaan informasi di BUMD.

Edukasi masyarakat

Perguruan tinggi, media, dan lembaga swadaya masyarakat didorong mendukung keterbukaan informasi melalui edukasi masyarakat dan pendampingan badan publik. "Pemerintah kalurahan diminta meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan kalurahan," tukasnya.

Di samping pemberian anugerah bagi badan publik,

Komisi Informasi Daerah DIY juga memberikan apresiasi kepada badan publik, di antaranya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk kategori badan publik pengelola website/medsos terbaik dan badan publik paling ramah difabel. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY untuk badan publik dengan layanan tercepat dan terbaik.

Kemudian, Kalurahan Srimulyo Bantul untuk badan publik dengan konten lokal terbaik. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY untuk OPD informatif dengan skor tertinggi, serta PPID utama DIY untuk PPID utama dengan persentase informatif tertinggi.

Anugerah apresiasi juga diberikan kepada para media mitra keterbukaan informasi publik di DIY, yakni RRI Yogyakarta, Sonora FM, KR Radio FM, Star FM, JITV, Harian Jogja, Tribun Jogja, dan Kedaulatan Rakyat. **(Ardhike Indah)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005